



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SKRIPSI

# KWENANGAN HAKAM TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKARA *SYIQAQ* (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan  
Gelara Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

**PAHRIZAL NASUTION**  
NIM.11523104780

**PROGRAM S1**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**PEKANBARU-RIAU**

**1441 H/2019 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Kewenangan Hakam tentang Perceraian dalam Perkara *Syiqaq* Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik, yang ditulis oleh:

Nama : Pahrizal Nasution

NIM : 11523104780

Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat dan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 21 Oktober 2019

Dr. JOHARI, MA

19640320 199102 1 001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *talak* studi komparatif pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik yang ditulis oleh :

Nama : **Pahrizal Nasution**  
Nim : 11523104780  
Program studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / tanggal : Rabu, 11 Desember 2019  
Waktu : 08 : 00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji munaqasyah fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2020 M

**Tim penguji munaqasyah**

Ketua

**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Sekretaris

**Aprizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I

**Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Helmi Basri, Lc, MA**

Mengetahui

Dekan fakultas syari’ah dan hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Nip. 19580712 198603 1 005





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pahrizal Nasution  
 NIM : 11523104780  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum  
 Tempat/Tgl.Lahir : Tanggabosi/4 April 1996  
 Jurusan/Semester : Perbandingan Mazhab Dan Hukum/IX  
 Alamat : Jl. Arifin Ahmad, Gg. Melati  
 Lulus Munaqasah : 11 Desember 2019  
 Judul : Kewenangan Hakam Tentang Perceraian Dalam Perkara  
*Syiqaq* (Studi Komperatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil plagiat maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akal sehat.

Pekanbaru, 12 December 2019

**Pahrizal Nasution**  
**NIM. 11523104780**

UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

### ***Judul penelitian ini adalah Kewenangan Hakam Tentang Perceraian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik)***

Persoalan hakam menjadi perdebatan ulama mengenai kewenangannya pada perceraian dalam menyelesaikan perkara *syiqaq*. Hal ini karena pemahaman teks *al-Qur'an* yang berbeda, sehingga penafsirannya pun berbeda faham. Selain itu, Hadits yang menjelaskan tentang kewenangan hakam pun tidak secara tersurat menjelaskan. Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam hal ini termasuk mazhab yang berada dalam pusaran perbedaan tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik membahas pendapat kedua imam tersebut untuk penulis sajikan dalam bentuk skripsi. Tidak hanya memaparkan kedua pendapat imam tersebut, akan tetapi penulis juga menyajikan perbedaan pendapat kedua imam tersebut. Sehingga judul skripsi ini penulis beri dengan judul "Kewenangan Hakam Tentang Perceraian Dalam Perkara *Syiqaq* Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik".

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana komparatif pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq* ? 2. Bagaimana relevansi pendapat kedua imam tersebut mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq* yang diterapkan pada pengadilan Agama Indonesia ?.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan paradigma normatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif.

Dari hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq* ini menurut Imam Syafi'i adalah tidak boleh serta merta menjatuhkan talak pada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu' sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak istri. Sedangkan menurut Imam Malik adalah hakam tersebut mempunyai kewenangan penuh atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, ia boleh memberikan putusan sesuai kondisi hubungan suami istri yang sedang berselisih tersebut, apakah hakam itu akan memberi keputusan cerai atau memerintahkan agar keduanya berdamai kembali.

Jika dilihat dari prosedur penyelesaian perkara *syiqaq*, maka keputusan yang diambil ini mengikuti prosedur pendapat Imam Malik. Akan tetapi pendapat Imam Syafi'i pun relevan digunakan dalam Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa beliau telah menyebutkan hakam tersebut harus memiliki beberapa kriteria. Namun untuk jumlah hakam tidak mengikuti pendapat kedua Imam tersebut, karena dalam Pengadilan Agama jumlah hakam tidak disyaratkan dua orang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala taufik, hidayah dan inayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu setia kepada umatnya memberikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Muhammad Dahler Nasution bin Muhammad Zubeir dan Ibunda Samsidar yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis dan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir di sisi Allah SWT.
2. Kepada bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin M,Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau
3. Kepada bapak Dr. H. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syri'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta bapak dan ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Kepada bapak Darmawan Tia Indrajaya M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum
  5. Kepada bapak Dr. Johari MA selaku Pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  6. Kepada Pimpinan Perpustakaan UIN SUSKA dan Perpustakaan Wilayah Pekanbaru, yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
  7. Kepada H. M. Arif Billah Lc, MH,I, dan H. Abdul Muhid Nasution Lc, selaku Motivator ananda, yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi kepada penulis dalam penyelesaian karya tulis ini.
  8. Keluarga penulis, abang handa Imaduddin Nasution, Ali Sahnan Nasution, Haidir Ali Nasution, Mahmud Yunus Nasution, serta adinda Muhammad Sulaiman Nasution, semuanya yang telah memberikan do'a dan dorongan moral maupun materil dalam setiap proses belajar selama di UIN SUSKA.
  9. Kepada teman-temanku tercinta, Muhammad Shobirin, Anwar Musaddat, Rahmat Ridwan, Pahrur Rozi, Hanif Azhar, Ihsan Ranua, Ednanda, yang telah membantu, memberikan nasehat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan baik materil maupun moril di kota Pekanbaru ini.
  10. Kemudian kepada keluarga besar jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, terutama teman-teman angkatan 2015.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11 Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu hingga selesai skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019

Pahrizal Nasution  
NIM: 11523104780

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| ABSTRAK .....  | i  |
| KATA PENGANTAR .....                                     | ii |
| DAFTAR ISI .....   | v  |
| BAB I: PENDAHULUAN .....                                 |    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 10 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan .....                             | 11 |
| D. Telaah Pustaka .....                                  | 11 |
| E. Metode Penelitian .....                               | 12 |
| F. Sistematika Penulisan .....                           | 15 |
| BAB II: BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK .....       |    |
| A. IMAM SYAFI'I .....                                    | 17 |
| 1. Biografi Imam Syafi'i .....                           | 17 |
| 2. Pendidikan Imam Syafi'i .....                         | 18 |
| 3. Hasil Karya Imam Syafi'i .....                        | 21 |
| 4. Metode Ijtihad Imam Syafi'i .....                     | 23 |
| 5. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kewenangan Hakam ..... | 27 |
| B. IMAM MALIK .....                                      | 28 |
| 1. Biografi Imam Malik .....                             | 28 |
| 2. Pendidikan Imam Malik .....                           | 28 |
| 3. Hasil Karya Imam Malik .....                          | 31 |
| 4. Metode Ijtihad Imam Malik .....                       | 34 |
| 5. Apresiasi Ulama kepada Imam Malik .....               | 40 |
| BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG SYIQAQ DAN HAKAM .....    |    |
| A. Tinjauan Umum Tentang Syiqaq .....                    | 41 |
| 1. Pengertian Syiqaq .....                               | 41 |
| 2. Syiqaq dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang .....        | 44 |
| 3. Macam-Macam Syiqaq .....                              | 47 |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |           |
|--|-----------|
| B. Tinjauan Umum Tentang Hakam.....  | 49        |
| 1. Pengertian Hakam .....  | 49        |
| 2. Dasar Hukum Hakam .....   | 53        |
| 3. Syarat Pengangkatan Hakam.....  | 69        |
| 4. Kewenangan Hakam.....   | 63        |
| <b>BAB IV: ANALISA PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TENTANG KEWENANGAN HAKAM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA SYIQAQ</b>             |           |
| A. Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Kewenangan Hakam .....  | 69        |
| 1. Pemikiran Imam Syafi'i tentang kewenangan Hakam .   | 69        |
| 2. Pemikiran Imam Malik tentang kewenangan Hakam ..  | 72        |
| B. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Kewenangan Hakam dalam Menyelesaikan Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia..... | 74        |
| C. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Kewenangan Hakam dalam Menyelesaikan Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia..... | 86        |
| <b>BAB V: PENUTU</b>   |           |
| A. Kesimpulan.....   | 92        |
| B. Saran dan Amanat .....  | 92        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>93</b> |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan diwujudkan dengan pengucapan ijab oleh wali dari mempelai perempuan, dan Kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan atas ijab tersebut. Makna dibalik Kabul yang diucapkan mempelai laki-laki adalah terwujudnya ikatan yang kuat dan penuh tanggung jawab, agar suami istri dapat bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, memberi naungan kasih sayang, dan memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik menurut ajaran islam.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( pasal 1 tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974), (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), cet. ke. 8, h. 74

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), cet. ke 1, h. 406



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam kenyataannya tidak mudah membina pernikahan yang bahagia, kadangkala terjadi pertikaian antara suami dan istri sampai menyebabkan terjadinya perceraian. Jika demikian, pernikahan bukan lagi menjadi sumber kebahagiaan dan ketentraman yang didambakan oleh semua pasangan.

Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan bumbu yang membuat rumah tangga itu sehat dan semakin mempererat hubungan antara suami dan istri, karena dengan pertikaian dapat mendewasakan seseorang dalam berfikir.

Maka ketika perselisihan tidak bisa terselesaikan, agama islam memberi solusi dengan mensyari'atkan hukum talak (perceraian). Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika didahului alasan-alasan sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi Grahamedia Press, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Grahamedia Press, 2014), cet. ke. 1, h. 365

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Percekcokan yang tajam dan terjadi terus-menerus inilah yang dalam terminologi fikih dikenal dengan *syiqaq*. Kata *syiqaq* berasal dari bahasa Arab *al-syaqqu* yang berarti sisi. Adanya perselisihan suami-istri disebut “sisi”, karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan, disebabkan adanya permusuhan dan pertentangan; sehingga padanan katanya adalah perselisihan (*al-khilaf*), perpecahan; permusuhan (*al-adawah*), pertentangan; persengketaan.

Menurut istilah fiqih *Syiqaq* ialah perselisihan suami-istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.<sup>4</sup>

Dr.Wahbah Zuhailly memberi defenisi *syiqaq* yaitu;

الشَّقَاقُ هُوَ النَّزَاعُ الشَّدِيدُ بِسَبَبِ الطَّعْنِ فِي الْكَرَامَةِ

“*Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan”.

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke. 3, h. 188

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia berpendapat bahwa *syiqaq* sebagai alasan perceraian karena adanya bahaya (*dharar*). Bentuk *dharar* yang dilakukan suami kepada istrinya bisa berbentuk perkataan dan perbuatan, seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah, suami berpaling, berpisah ranjang tanpa ada sebab yang membolehkan.<sup>5</sup>

al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan permasalahan *syiqaq* dengan cukup lugas. *Al-Syiqaq* berarti perselisihan yang berpotensi membuat kedua pihak berpisah, dan kekhawatiran masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan itu dengan lahirnya sebab-sebab perselisihan.<sup>6</sup>

Pada ayat 35 surah an-Nisa' tentang *syiqaq*, Allah terangkan cara yang baik untuk diterapkan ketika terjadi pertengkaran dan ketika takut terjadi perpecahan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, “*Fiqh Islam*”, (Depok: Gema Insani, 2011), cet. Ke 1, h. 456

<sup>6</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Nor Aly, (Semarang: Toha Putra, 1986), cet. ke 1, h. 42

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), cet. ke 1, h. 84



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

*Syiqaq* atau perselisihan diantara mereka kadang-kadang disebabkan oleh *nusyuznya* istri, kadang-kadang pula disebabkan kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan di dalam surah an-Nisa' ayat 34. Tetapi jika hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan *nusyuznya*, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara kedua suami istri. Dalam surah an-Nisa' ayat 35 tersebut juga disyaratkan bahwa dua orang hakam mengetahui masalah pasangan suami istri secara mendalam, karena dekatnya hubungan dengan kedua pasangan, sehingga dapat ikut membantu penyelesaian masalah.<sup>8</sup>

Hakam adalah orang yang diutus dari pihak suami dan istri yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suami istri.<sup>9</sup> Dalam konteks seperti ini maka mediasi atau penyelesaian konflik di antara keduanya menjadi wajib atau fardhu demi kemaslahatan antara suami istri.

Para ulama sepakat atas mengirim juru damai atau dua hakam apabila terjadi perselisihan antara suami istri, tanpa diketahui keadaan keduanya

<sup>8</sup> Abu al-Hasan Ali al-Mawardi al-Bashry, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam al-Syafi'i*, Juz 9 (Baerut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), cet. ke 1, h. 601-602

<sup>9</sup> Muhammad Syaifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet. ke 1, h. 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dalam perselisihan tersebut, yaitu siapa di antara mereka yang benar dan yang salah.<sup>10</sup>

Para imam mazhab berselisih pendapat berkenaan dengan kewenangan hakim tentang perceraian dalam perkara *syiqaq* ini. Apakah keduanya hanya berkedudukan sebagai wakil dari pihak suami maupun istri yang sebatas berhak menasehati dan mendamaikan, lantas keputusan melanjutkan atau mengakhiri pernikahan ada pada pihak suami istri, atukah sekaligus keduanya menjadi hakim yang berhak memutuskan lanjut dan tidaknya sebuah pernikahan.

Pertama, Imam Syafi'i dan pengikutnya menyatakan bahwa kedua hakim tersebut tidak boleh mengadakan pemisahan (menceraikan), kecuali jika suami menyerahkan kuasa pemisahan tersebut kepada *hakamain*. Ini berarti kewenangan hakim hanya sebatas mendamaikan dan menasehati antara suami istri yang berselisih. Ia tidak berhak memisahkan (menceraikan) ikatan suami istri secara sepihak, kecuali jika keduanya telah melimpahkan wewenang tersebut kepada hakim.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا : لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَفْرَقَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجُ إِلَيْهِمَا التَّفْرِيقَ<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman, (Semarang: as-Syifa', 1990), cet. ke-1, h. 554

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2, (Lebanon: Darul Ibnu Haazim, 1995), cet. ke 1, h. 74

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

“Imam Syafi’i dan Abu Hanifah beserta pengikut keduanya berpendapat: tiada kewenangan bagi keduanya (hakam) untuk menceraikan kecuali si suami memberi izin kepada keduanya (hakam) untuk menceraikan”

Hakam menurut teks di atas memiliki batasan kewenangan, yang tidak serta merta memutuskan atau melanjutkan akad pernikahan kedua belah pihak. Hal ini karena Imam Syafi’i dalam satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam itu, karena untuk menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan tidak lebih dan tidak kurang.<sup>12</sup>

Kedua, Imam Malik dan pengikutnya menyatakan bahwa juru damai atau hakam boleh memisahkan (menceraikan) atau mengumpulkan kembali (mendamaikan) kedua pasangan suami istri yang berselisih tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan kedua suami istri terlebih dahulu.

يَجُوزُ قَوْلُهُمَا فِي الْفِرْقَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ بغيرِ توكيلِ الزَّوْجِ وَلَا إِذْنٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ<sup>13</sup>

“(Imam Malik berpendapat) keduanya (hakam) boleh memisahkan dan menceraikan tanpa diwakilkan si suami dan tanpa diminta izin dari suami-istri”

Ini berarti, kedudukan hakam tidak hanya sebagai wakil juru damai dari kedua belah pihak, lebih daripada itu keputusan berada penuh di tangan hakam dalam hal memutuskan perkara. Dalam keterangan yang lain, hal ini karena Imam Malik menganggap mereka berhak menetapkan hukum sesuai

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet. ke. 5, h. 522

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman, (Semarang: as-Syifa', 1990), cet. ke. h. 554

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik disetujui kedua pasangan yang berselisih maupun tidak.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut jika dilihat dan diperhatikan kenyataan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat masih terjadi silang dan berbeda pendapat. Jumhur Ulama berpendapat bahwa hakam yang dimaksud disini sama dengan hakim, oleh karena itu hakam dapat menghukum (memutus) perkara. Kewenangannya tidak terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan suami istri, akan tetapi diikuti dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan.<sup>15</sup>

Perbedaan pendapat tersebut terlihat antara Imam Syafi'i (150 H-240 H) dan Imam Malik (93 H-179 H). Ulama yang secara rentang masa tidak berjauhan ini memberikan pandangan yang berbeda dalam kasus kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq*, meskipun Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik. Imam Malik menyatakan bahwa hakam mempunyai kewenangan penuh untuk memutus (menceraikan) atau melanjutkan ikatan pernikahan mereka, yang penulis telaah pendapat beliau dari kitab *al-Muwatta' al-Imam Malik* :

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي الْحَكَمَيْنِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) . إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفَرْقَةَ وَالْإِجْتِمَاعَ.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), cet. ke. 5, h. 522

<sup>15</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, tth), cet. ke 1, h. 522

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفِرْقَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ<sup>16</sup>

“Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Ali bin Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang difirmankan Allah swt: (“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”).

an-Nisa’ ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka, Malik berkata: “Itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu, apapun yang dikatakan oleh kedua hakam dapat dijadikan pertimbangan”.

Pendapat selanjutnya adalah dari Imam Syafi’i yang menyatakan hakam dalam perkara *siqaq* tidak berwenang untuk memberi putusan pada perkara tersebut, kecuali telah terjadi akad untuk mewakili perkara tersebut kepada hakam agar diselesaikan menurut pendapat mereka. Penulis akan mengkaji pendapat beliau dari kitab *al-Umm*.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْتَارُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْأَلَ الرَّوْحَيْنِ أَنْ يَتَرَاضِيَا بِالْحَكَمَيْنِ وَيُوكَلَاهُمَا مَعًا فَيُوكَلَهُمَا الرَّوْجُ إِنْ رَأَيَا أَنْ يَفْرَقَا بَيْنَهُمَا فَرْقًا عَلَى مَا رَأَيَا مِنْ أَخَذَ شَيْءٍ أَوْ غَيْرَ أَخَذَهُ إِنْ اخْتَبَرَا تَوَلَّيَا مِنَ الْمَرْأَةِ عَنْهُ<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwattha’*, Juz 2 (Lebanon: Darul Ihya wa At-Turratsul Arabiy, 1985), cet. ke 1, h. 584

<sup>17</sup> Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Wafa’, 2001), cet. ke 1, h. 495

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

“Imam Syafi’i berkata: hendaklah imam menanyakan suami istri apakah ridha dengan hakam yang dipilih yang dan diwakilkan untuk mendamaikan serta diwakilkan untuk menceraikan atas putusan yang mereka ambil dari suami atau istri”

Berpijak dari dua pandangan yang berbeda tersebut, maka penulis tertarik dan berminat untuk meneliti persoalan yang berkaitan dengan kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq* secara studi komparatif, karena sangat wajar terjadinya perbedaan pendapat dalam suatu hal dilatarbelakangi beberapa faktor yang mendukung pendapat para imam tersebut. Maka sangat menarik apabila penulis mengambil judul:

**“Kewenangan Hakam tentang Perceraian dalam Perkara *Syiqaq* (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik).”**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana komparatif pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq* yang diterapkan pada Pengadilan Agama di Indonesia?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat serta dalil yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq*
2. Untuk mengetahui pendapat mana yang lebih relevan pada Pengadilan Agama di Indonesia.

### D. Telaah Pustaka

Persoalan hakam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga masih sering dipertanyakan, hal ini disebabkan oleh pemahaman arti hakam itu sendiri yang sering diartikan berbeda-beda. Sebagaimana ulama mengartikan hakam sebagai “wakil” dari suami istri yang sedang berselisih. Sebagian lagi mengartikan hakam sebagai “hakim” yang berhak untuk menceraikan atau mendamaikan suami istri yang bersangkutan. Adapun tentang penelitian ini, belum ada yang meneliti sebelum-sebelumnya.

Oleh karena itu, penulis akan meneliti kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq*, dengan membandingkan pendapat mazhab.

Penulis akan menekankan pembahasan pada pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* dan pendapat Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'*. Selain itu penelitian ini memfokuskan pada kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq*, yang membutuhkan penanganan secara serius demi kemaslahatan rumah tangga mereka yang diwakilkan dalam UU No.50 Tahun 2009 Pasal 76.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).<sup>19</sup> Berdasarkan pada pengertian ini, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku/ kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq*.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer:

Data primer (*primary data*) adalah data yang diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tulisan

<sup>18</sup> Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), cet. ke 1, h. 138

<sup>19</sup> Nana Syaodah, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), cet. ke 1, h. 52

<sup>20</sup> Sofyan A.P.Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), cet. ke. 1, h. 155

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i dari kitab *al-Umm* dan Imam Malik dalam tulisannya dari kitab *al-Muwatta'*.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, jurnal, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber-sumber sekunder yaitu dari buku-buku ilmiah, kitab dari murid-murid Imam Syafi'i maupun Imam Malik, pendapat para pakar, fatwa-fatwa ulama, undang-undang Peradilan Agama di Indonesia dan literatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

#### c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq*.

d. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

- 1) Deskriptif, adalah teknis analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknis ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum islam, atau sebuah pendapat hukum. Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Disini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* dan pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta'*.
- 2) Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqh. Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menanggapi masalah kewenangan hakam tentang

perceraian dalam perkara *syiqaq*, kemudian disimpulkan implikasi hukumnya, dan dianalisis relevansinya di Pengadilan Agama di Indonesia.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih berlanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penelitian tersebut. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang biografi Imam Syafi'i dan Imam Malik, tentang sejarah pendidikan dan metode ijtihad serta apresiasi Ulama dengan tujuan faham atas biografi dan pemikiran kedua Imam tersebut.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan hukum *syiqaq* secara umum, diantaranya pengertian *syiqaq*, dasar hukum *syiqaq*, macam-macam *syiqaq*, dan tinjauan hukum hakam secara umum, diantaranya pengertian hakam, dasar hukum hakam, syarat pengangkatan hakam dan kewenangan hakam.

Bab keempat, merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis komparasi terhadap pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara *syiqaq*, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

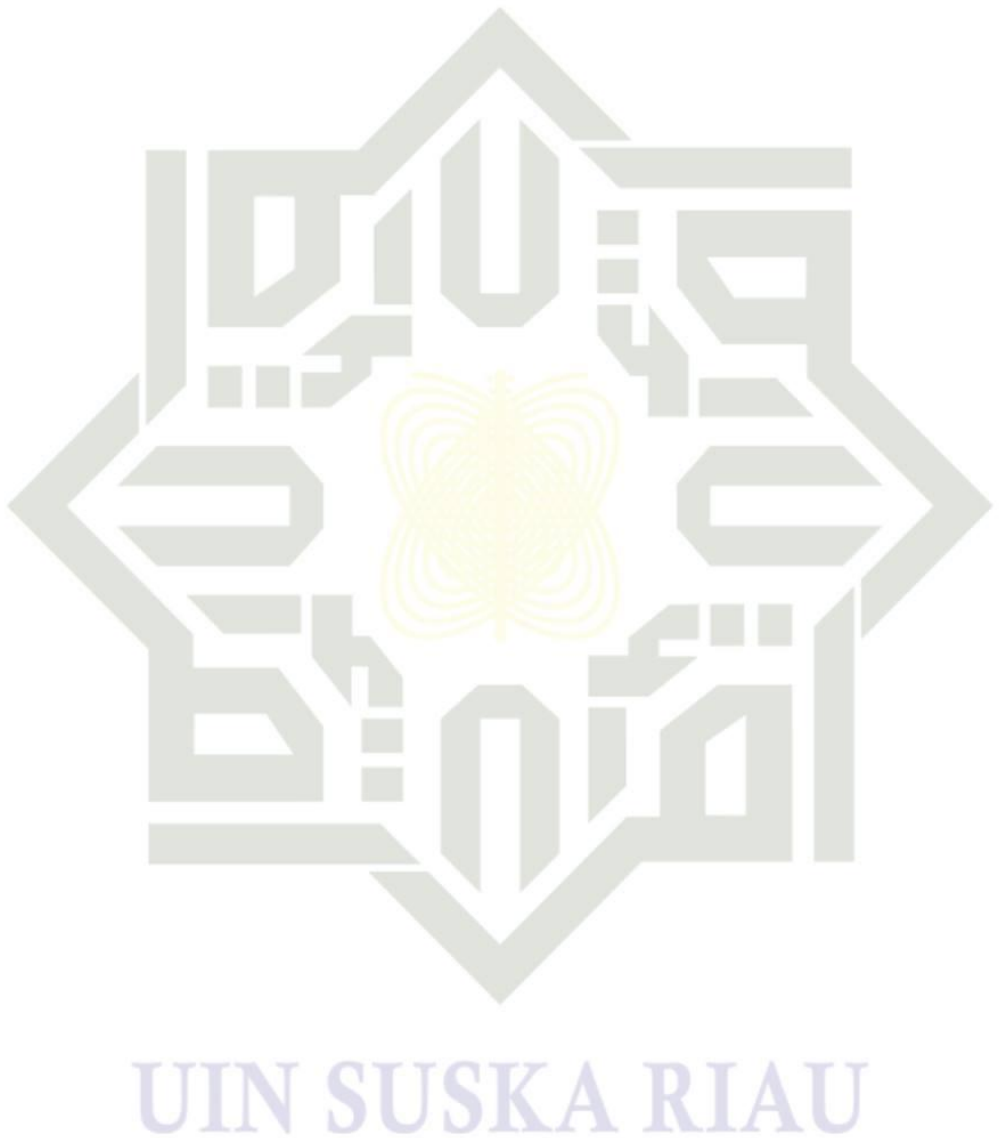
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

relevansi kedua pendapat tersebut pada Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.

Bab kelima, adalah penutup dan kesimpulan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK

#### A. Imam Syafi'i

##### 1. Biografi Imam Syafi'i

Nama Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin As-Syafi'i bin Sa'id bin 'Ubaid Abu Yazid bin Hasyim bin Al-Harits bin Abdul Manaf.<sup>21</sup> Beliau dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M, tepatnya pada zaman Dinasti bani Abbas yaitu yaitu pada masa kekuasaan Abu ja'far Al-Manshur.

Ayahnya bernama Idris, dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah Al-Mahdh. Imam Syafi'i merupakan keturunan bangsa Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu Pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya Fatimah merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.<sup>22</sup>

Ketika Imam Syafi'i masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang kerahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang dalam kondisi memprihatinkan dan serba kekurangan.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), cet. ke-9, h. 32

<sup>22</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Adamedia Group, 2013), cet. ke. 9, h. 129

<sup>23</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), cet. ke 1, h. 52

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada usia 2 tahun, Imam Syafi'i bersama ibunya kembali ke Makkah. Setidaknya ada sejumlah alasan yang menjadi latar belakang sang Ibu untuk memilih kembali ke Makkah. *Pertama*, disana masih banyak keluarga besar dari pihaknya sendiri dan keluarga dari pihak suaminya sehingga Imam Syafi'i kecil masih dapat merasakan kehangatan kasih sayang dari keluarga besarnya. *Kedua*, yakni menjadi tujuan utama sang Ibu yaitu kota suci Makkah merupakan pusat pengetahuan dan kemuliaan pada masanya, dimana Masjidil Haram dipenuhi ahli-ahli hukum Islam, ahli Qira'ah, ahli Hadits, dan ahli tafsir. *Ketiga*, di sekeliling kota Makkah masih banyak terdapat pedesaan dimana tata karma dan kesopanan masih terjaga dengan baik, yang amat berguna bagi terasahnya kepekaan social, kecerdasan, moral, dan mental. Beberapa hal tadi yang menjadi pertimbangan sang Ibu untuk meninggalkan Palestina dan kembali ke Makkah.<sup>24</sup>

## 2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu sembilan tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, disamping itu ia juga hafal sejumlah Hadits.<sup>25</sup>

Setelah selesai mempelajari al-Qur'an dan Hadits, Imam Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), cet. ke-4, h. 20-21

<sup>25</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989), cet. ke 1, h. 88

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia pergi kepedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, Imam Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.<sup>26</sup>

Pada awalnya Imam Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni Fiqih dan ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat “pecinta ilmu pengetahuan”, maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan.

Kepada orang-orang yang dipandangnya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, ia pun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya. Beliau di kota Makkah belajar ilmu fiqih kepada Imam Muslim bin Khalid az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Beliau lama belajar kepada guru itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan agama.

Tentang ilmu Hadits, beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang ulama besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Dan tentang ilmu al-Qur'an, beliau belajar kepada Imam Isma'il Qasthanthin, seorang ulama besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Selanjutnya kepada para ulama lainnya di Masjid al-Haram, beliau belajar

<sup>26</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Al-Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), cet. ke 1, h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufti di kota Makkah.

Menurut riwayat, ketika beliau berumur 10 tahun sudah dapat mengerti tentang isi kitab “*al-Muwattha*” yang disusun oleh Imam Malik.<sup>27</sup> Terhadap semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan al-Qur’an, Sunnah, ucapan para sahabat, sejarah serta pendapat-pendapat yang lawanan dari para ahli dan sebagainya diaduk dengan sempurna dengan pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab dari gurun pasir itu baik dalam ilmu bahasa, nahwu, sharaf, dan syairnya.

Adapun ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi’i sebagai berikut:

- a. Mutharaf bin Mazim
- b. Hisyam bin Yusuf
- c. Umar bin Abi Salamah
- d. Yahya bin Hasan

Sedangkan selama tinggal di Makkah, Imam Syafi’i belajar kepada beberapa ulama antara lain:

- a. Sufyan bin Uyainah
- b. Muslim bin Khalid az-Zanniy
- c. Sa’id bin Salim al-Kaddah<sup>28</sup>

Selain dua aliran fiqh di atas (aliran ra’yu dan hadits), Imam Syafi’i juga belajar fiqh aliran al-Auza’i dari Umar Ibn Abi Salamah dan

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 153

<sup>28</sup> Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu pengantar Komprehensif Kepada Hukum islam*, (Bandung: Tafakur, 2007), cet. ke. 1, h. 99-100

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh al-Laits dari Yahya bin Hasan. Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang melestarikan kajian fiqh dalam alirannya. Yang paling berperan dalam pengembangan aliran fiqh Imam Syafi'i ini antara lain:

- a. al-Muzani
- b. al-Buwaiti
- c. Hasan bin Ali Karabisi
- d. Abu Saur Ibrahim bin Khalid Yamani Al-Kalbi
- e. Hasan bin Ibrahim bin Muhammad as-Sahab az-Za'farani.<sup>29</sup>

Dalam perjalanan hidupnya, setelah berpindah-pindah di beberapa tempat yang pada akhirnya beliau berpindah ke negeri Mesir, kedatangannya disambut oleh ulama-ulama di sana, ternyata beliau di Mesir dapat mengembangkan ilmu yang sudah didapatkannya dan di sanalah beliau menjadi ulama yang besar dan terkenal pada waktu itu.

### 3. Hasil Karya Imam Syafi'i

Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi'i adalah:

- a. Kitab *ar-Risalah*

Kitab *ar-Risalah* merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang oleh beliau, oleh karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Nadirsyah Hawari, *sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. ke 1, h. 88

<sup>30</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Adamedia Group, 2013), cet. ke. 9, h. 131-132

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab *ar-Risalah* merupakan kitab yang lengkap dalam ushul fiqh, sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasannya sebagaimana karya Imam Syafi'i ini.

Imam Suyuthi ( w. 911 H) berkata:

“Sudah merupakan ijma' bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliaulah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya dalam satu karya tulis tersendiri”. Imam Malik dalam kitab *Muwattha'* hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya, juga yang lainnya yang hidup satu kurun dengannya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan.<sup>31</sup>

b. Kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* yang berarti induk adalah sebuah kitab al-Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir beliau menghimpun semua kitab-kitab kecil lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada muridnya yaitu ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya.<sup>32</sup>

Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam kitab *ar-Risalah*.<sup>33</sup> *al-Umm* memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai

<sup>31</sup> Muhammad Ibn Hasan al-Hajwy, *al-Fikr al-Sunnah Fi Tarikh al-Fikr al-Islamy*, Jilid I, (Madinah; Maktabah al-Ilmiyah, 1996), cet. ke 1, h. 163

<sup>32</sup> Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), cet. ke 1, h. 328

<sup>33</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), cet. ke. 9, h. 132



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah fiqh, dalam kitab ini juga memuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-Qaulu al-Qadim* dan *al-Qaulu al-Jadid*.<sup>34</sup>

#### 4. Metode Ijtihad Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (ra'yu dan hadits) secara profesional.<sup>35</sup> Hal tersebut dikarenakan Imam Syafi'i pernah berguru kepada guru yang beraliran al-hadits yaitu Imam Malik bin Anas, dan juga berguru kepada guru yang beraliran ar-Ra'yu yaitu Imam al-Syaibani.

Adapun metode istidlal atau metode ushul fiqh yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah:<sup>36</sup>

##### a. al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya masih ada yang bersifat *dzanni*, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan *qarinah* yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas al-Qur'an, beliau memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan*, beliau

<sup>34</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), cet. ke 1, h. 17-219

<sup>35</sup> Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke. 4, h.

<sup>36</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke 1, h. 147

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengklasifikasikan dilalah *nash* atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada dilalah '*amm* dengan maksud '*amm*, ada pula dilalah '*amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula dilalah '*amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain dilalah tersebut menunjuk pada makna implisit bukan makna eksplisit.<sup>37</sup>

#### b. Sunnah

Menurut Imam Syafi'i al-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan al-Qur'an yang *mujmal*, *muthlaq*, dan '*amm*.<sup>38</sup>

Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayan* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Malik dalam pemakaian hadits *ahad*.

Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Imam Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

#### c. *Ijma'*

*Ijma'* menurut Imam Syafi'i ialah "tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan." Beliau berpendapat,

<sup>37</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), cet. ke 1, h. 21-

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 190

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.

Imam Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan hujjah adalah *ijma' sharih*, hal ini menurutnya karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan.

Imam Syafi'i menolak *ijma' sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid, dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.<sup>39</sup>

d. *Qiyas*

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.<sup>40</sup>

Imam Syafi'i menempatkan *qiyas* setelah al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan fatwa sahabat, beliau menggunakan *qiyas* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah:

- 1) Orang-orang yang mengambil *qiyas* harus mengetahui bahasa arab.

<sup>39</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. ke 1, h. 91-92

<sup>40</sup> Abu Zahra, *al-Syafi'i Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara'uhu Wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. ke 1, h. 298



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengetahui hukum al-Qur'an, *faraid*, *uslub*, *nasikh-mansukh*, *'amm khas*, dan petunjuk dilalah *nash*.
- 3) Mengetahui sunnah, qaul sahabat, *ijma'* dan ikhtilaf dikalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.<sup>41</sup>

e. *Qaul* sahabat

Imam Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid.

Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

f. *Istishab*

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam asy-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul*, mengemukakan defenisi bahwa *istishab* adalah "dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya."<sup>42</sup>

Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan defenisi bahwa *istishab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang

<sup>41</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), cet. ke 1, h. 510-

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), cet. ke 1, h. 450-451

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubahnya.<sup>43</sup>

Menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum asal sebelum hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.<sup>44</sup>

Imam syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari jum'at tanggal 30 rajab 204 H, setelah menyebarkan dan manfaat kepada banyak orang, kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai saat ini masih diziarahi orang banyak.<sup>45</sup>

Imam Syafi'i wafat pada usia 54 tahun dengan menghasilkan kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu, diantaranya mengenai fiqh, tafsir, sastra (adab), sejarah, dan ushul fiqh.<sup>46</sup>

#### 5. Apresiasi Ulama kepada Imam Syafi'i

Imam Muhammad Idris bin al-Syafi'i berkata, "Apabila disebut-sebut ulama ahli hadits, maka Imam Malik bintangnya, dan tak ada seorang pun yang lebih aku percayai tentang hadits selain daripada imam

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 51

<sup>44</sup> Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi Qarni ats-Tsani al-Hijri*, (Madinah: Maktabah Imiah, 1997), cet. ke 1, h. 147

<sup>45</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1997), cet. ke 1, h. 1680

<sup>46</sup> Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), cet. ke 1, h. 320

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malik”.Imam. Yahya bin Mu“in pernah berkata, “Imam Malik adalah seorang raja bagi orang-orang yang beriman tentang ilmu hadits, yakni seorang yang tertinggi tentang ilmu hadits.<sup>47</sup>

## B. Imam Malik

### 1. Biografi Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Harits bin Gaiman bin Kutail bin Amr al-Asbahi, lahir di Madinah suatu daerah di negeri Hijaz pada tahun 93 H/712 M.<sup>48</sup>

Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah,kakeknya Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H, saat itu Madinah adalah kota “ilmu” yang sangat terkenal.<sup>49</sup>

Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpandang di Madinah, karenanya sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya.

### 2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII, pada waktu itu

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke 2, h. 196

<sup>48</sup> Abdul Mujib, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, (Bandung: Kencana, 2007), cet. ke 1, h. 184

<sup>49</sup> Tim Ilmiah Purnasiswa, *Sejarah Tasyri’ Islam*, (Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual, 2006), cet. ke 1, h. 260



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: Golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam.

Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan dari beberapa guru yang terkenal, pelajaran pertama yang diterima adalah al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirannya. Ia hafal al-Qur'an di luar kepala, serta banya menghafal hadits, sehingga dijuluki sebagai ahli hadits.<sup>50</sup>

Karena keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya. Karena demikian, ia pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti:

- a. Abd Rahman ibn Hurmuz (Ulama besar di Madinah)
- b. Nafi' Maulana ibn 'Umar (berguru dalam bidang ilmu hadits)
- c. Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan sebutan Rabi'ah al-Ra'yi (berguru dalam bidang fiqh)
- d. Ibn Syihab az-Zuhri dan lain lain.<sup>51</sup>

Adapun murid-muridnya adalah:

- a. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab
- b. Asbah bin Farj
- c. Imam Syafi'i

<sup>50</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke 1, h. 103

<sup>51</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2003), cet. ke 1, h. 137

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Muhammad bin Ibrahim, dan lain-lain.<sup>52</sup>

Pada usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu, kecintaannya kepada ilmu menjadikan hamper seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari al-Mansur, al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, dan al-Ma'mun, pernah menjadi murid Imam Malik. Ulama besar, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik, belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya.<sup>53</sup>

Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang, ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Imam malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah, hingga akhir hayatnya ia tak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji. Beliau wafat pada tahun 179 H ketika berumur 86 tahun dan meninggalkan 3 orang putera dan seorang puteri.<sup>54</sup>

Tujuan pemikiran Imam Malik adalah ingin mengemukakan doktrin-doktrin yang diterima dari kalangan ulama Madinah dan begitu jauh konsep-konsepnya didasari pada pemikiran perorangan dan wakil

<sup>52</sup> Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), cet. ke 1, h. 37

<sup>53</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. ke 1, h. 107

<sup>54</sup> Abdul Mujib, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, (Bandung: Kencana, 2007), cet. ke 1, h. 184

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aliran Madinah tersebut. Di dalam menggabungkan penggunaan fikiran dengan ketergantungan kepada tradisi yang hidup, Imam Malik menampakkan ciri khas Madinah, sehingga fiqih yang dikarang oleh Imam Malik dilatar belakangi oleh Madinah.

Dalam berbagai hal, banyak ditemui bahwa pemikiran Imam Malik banyak di Ilhami oleh tradisi masyarakat Madinah yang di dasari pertimbangan-pertimbangan yang matang. Masyarakat penduduk Madinah banyak menerima fatwa-fatwa Imam Malik walaupun kondisi masyarakat yang beragam aliran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fatwa-fatwa Imam Malik antara lain; budaya, sifat, dan kondisi masyarakat pada masa itu yang plural, sehingga Imam Malik menggunakan teori *maslahah mursalah*.

Perkembangan mazhab Imam Malik pernah menjadi Mazhab resmi di Mekkah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (Spanyol), Marokko, dan Sudan.<sup>55</sup> Jumlah pengikut mazhab Maliki kini menyusut, mayoritas penduduk Mekkah dan madinah saat ini mengikuti mazhab Hanbali. di Iran, Mesir, jumlah pengikut mazhab Maliki juga tidak banyak, hanya di Maroko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut mazhab Maliki.

### 3. Hasil Karya Imam Malik

Penyebaran suatu pemikiran dari seorang tokoh, dapat dilihat dari adanya dan tidak adanya karya yang telah dihasilkan dengan dukungan

<sup>55</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2013), cet. ke 1, h. 152-153



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para murid dan pendukung yang siap menyebarkan dan mengembangkannya. Sedangkan diantara karya Imam Malik tersebar adalah:<sup>56</sup>

a. Kitab *al-Mudawwamah al-Kubra*

Merupakan kumpulan sebuah risalah yang didalamnya memuat tidak kurang dari 1.036 masalah faywa-fatwa Imam Malik yang telah dikumpulkan oleh As'ad bin al-Farut an-Naisabury (salah satu murid beliau di Tunisia) selama berada di Irak. Awal mula kitab *al-Mudawwamah* adalah ketika di Irak As'ad bin al-Farut bertemu dengan Abu Yusuf dan Muhammad, murid Abu Hanifah.

Ia banyak mendengar masalah fiqh aliran Irak dari keduanya, kemudian pergi ke Mesir dan bertemu murid Imam Malik bernama Ibn Qasim, kemudian masalah fiqh yang didapat dari murid Abu Hanifah ditanyakan kepada murid Imam Malik, dan jawabannya menjadi sebuah kitab.

b. Kitab *al-Muwattha*

Kitab ini ditulis tahun 144 H, atas anjuran Khalifah Ja'far al-Manshur, di dalamnya merupakan hasil penelitian jumlah Atsar Rasulullah saw, sahabat dan tabi'in yang jumlahnya 1.720 buah. Ditemukan dua aspek pembahasan, yaitu: aspek Hadits dan aspek Fiqh.

<sup>56</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2013), cet. ke 1, h. 149-152

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1) Aspek Hadits

Dalam aspek hadits ini, lebih disebabkan karena *al-Muwattha* banyak sekali yang mengandung Hadits, baik yang berasal dari Rasulullah saw, sahabat maupun tabi'in, dalam pengumpulannya Imam Malik membutuhkan banyak waktu untuk menyeleksi dengan sangat ketat dan teliti, beliau menghabiskan waktu 40 tahun.

#### 2) Aspek Fiqih

Adapun yang dimaksud aspek fiqih adalah karena kitab *al-Muwattha* ini disusun berdasarkan sistematika bab-bab pembahasan kitab-kitab fiqih, yaitu bab Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Nikah dan seterusnya. Kemudian setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa pasal, sehingga hadits-hadits yang ada dalam *al-Muwattha* serupa dengan kitab-kitab fiqih.

Dengan demikian, kitab-kitab karya ulama bermazhab Maliki itu adalah:<sup>57</sup>

- a. *Al-Muwattha al-Shugra*, hadits koleksi Imam Malik Karya Imam malik
- b. *Al-Muwattha al-Kubra*, kumpulan risalah Imam Malik oleh As'ad bin al-Farut an-Naisabury
- c. *Al-Mudawwamah*, kumpulan hadits diskusi As'ad dengan Ibn Qasim, oleh As'ad al-Farut An-Naisabury

<sup>57</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2013), cet. ke 1, h. 151-152

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Al- Asadiyah*, hasil revisi Shanuun dari kitab *al-Mudawwamah* karya As'ad, oleh Shanuun menurut mazhab Imam Malik

#### 4. Metode Ijtihad Imam Malik

Imam Malik adalah seorang Imam Mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana Abu Hanifah. Karena ketekunan dan kecerdasan yang dimilikinya, beliau tumbuh dengan cepat sebagai ulama kenamaan terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh.

Sistematika sumber hukum Imam Malik pada dasarnya tidak menuliskan secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik sebagai *Qadhi 'Iyad* dalam kitabnya *al-Mudarak* yang dikutip oleh Dedi Supriyadi dalam bukunya dijelaskan sebagai berikut:<sup>58</sup>

انّ منهاج امام دار الهجرة انه يأخذ بكتاب الله تعالى أوّلا فإن لم يجد في كتاب الله تعالى نصّا اتّجه إلى السنّة ويدخل في السنّة عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفتاوى الصّحابة واقضيتهم وعمل أهل المدينة والقياس والمصلحة المرسلة وسدّ الذرائع والعرف والعادات

“Sesungguhnya Imam Dar al-Hijrah, pertama ia mengambil dari al-Qur'an, jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an nashnya, ia mengambil dari as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya adalah hadits-hadits Nabi dan fatwa-fatwa shahabat), amal ahlu Madinah, *Qiyas*, *Mashlahah Mursalah*, *Sadd Adz-Dzara'i* dan Adat.”

<sup>58</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. ke 1, h. 166-167



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur'an

Dalam memegang al-Qur'an sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum, beliau mendasarkannya atas “*Dhahiri Nashi al-Qur'an*” secara umum dan tidak menerima *takwil*. Hal ini meliputi *Mafhum Mukhalafah* dan *Mafhum Aulawiyah* dengan tetap memperhatikan pada *illatnya*.

b. As-Sunnah

Imam Malik mengambil sunnah yang *mutawattir masyhur* (setingkat dibawah mutawattir), dan *khavar ahad* (sebahagian besar mendahulukan hadits *ahad* dari *qiyas*). Selain itu, Imam Malik menggunakan hadits *munqathi'* dan hadits *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Akan tetapi jika makna yang terkandung dalam hadits tersebut dikuatkan dengan *ijma' ahlu Madinah* (kesepakatan penduduk Madinah) maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang terkandung dalam hadits daripada makna zhahir al-Qur'an baik *mutawattir* maupun *masyhur* dan hadits *ahad*.

c. Amalan ahlu Madinah

Imam Malik memegang teguh tradisi masyarakat Madinah sebagai hujjah atau dalil hukum karena amalannya, yang dinukil langsung dari Rasulullah. Ia mendahulukan amalan ahlu Madinah ketimbang *khavar ahad*, sedangkan para fuqaha tidak seperti itu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ijma' ahlu Madinah* ini ada beberapa tingkatan, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Kesepakatan ahlu Madinah yang sumbernya dari *naql*
- 2) Amalan ahlu Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, amalan ahlu Madinah menjadi hujjah bagi Imam Malik.
- 3) Amalan ahlu madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahlu Madinah, maka *tarjih* itulah yang dimenangkan menurut Imam Malik. Hal ini pula dilakukan Imam Syafi'i muridnya.

Amalan ahlu Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Rasulullah saw, *ijma' ahlu Madinah* seperti ini bukan hujjah, baik menurut Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama kalangan Mazhab Maliki.

#### d. Fatwa Shahabat

Maksudnya adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh shahabat besar berdasarkan pada *naql*. Hal berarti perwujudan hadits-hadits yang harus diamalkan, sebab mereka tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang sudah difahami dari baginda Rasulullah saw. Sekalipun demikian, tetap harus tidak bertentangan

<sup>59</sup> Manna al-Qaththan, *Tarikh at-Tasyri' al-Islam, at-Tasyri' wa al-Fiqh*, (Riyadh: Ma'abah al-Ma'arif, 2001), cet. ke 1, h. 260

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hadits *marfu'*. Karena hal itulah, fatwa shahabat menurut mazhab Maliki lebih didahulukan daripada *Qiyas* dan bisa dijadikan sebagai hujjah.

e. *Qiyas*

*Qiyas* adalah menghubungkan suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh *nash* dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran *illat* hukumnya sama, misalnya sabu-sabu dengan arak. Imam Malik menjadikan *qiyas* sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an, Hadits, Amalan ahlu Madinah dan Fatwa shahabat.<sup>60</sup>

f. *Al-Istihsan*

Yang dimaksud *Istihsan* menurut Imam Malik adalah dalil umum bisa di takhsish dengan dalil apapun, baik dengan dalil yang *zhahir* maupun dengan dalil *ma'na*. Imam Malik melakukan *Istihsan* dengan cara men-takhsish dalil umum dengan *al-mashlahah*. Ia berpandangan boleh men-takhsish dan menggunakan *illat* dengan *al-maslahah*.<sup>61</sup>

Atau dapat dipahami *Istihsan* adalah menentukan hukum dengan mengambil *maslahah* sebagai bagian dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan *Istidlal al-mursalah* daripada *qiyas*. Sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya berdasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi berdasarkan pada *maqasid al-syari'ah* secara keseluruhan.

<sup>60</sup> Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), cet. ke 1, h. 72

<sup>61</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke 1, h. 111



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud syara' yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Menurutny taklif (beban hukum) itu seiring dengantujuan syari'at, yaitu untuk memberi kemaslahatan dalam kehidupan manusia.<sup>62</sup>

h. *Sad Az-Zara'i*

Yang dimaksud dengan *Sad az-Zara'i* adalah menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini Imam Malik menggunakannya sebagai salah satu jalan pengambilan hukum, sebab semua jalan atau yang bisa mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram.

i. *Istishhab*

Adalah tetap suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada dimasa lampau. Maka sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu juga sebaliknya.

<sup>62</sup> Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibn Rusdy*, (Malang: Kutub Minar, 2005), cet. ke 1, h.

j. *Syar'u Man Qabalana*

Prinsip yang dipakai oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum adalah kaidah “*syar'u man qabalana*” dan prinsip ini dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan hukum oleh Imam Malik.

Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa jika al-Qur'an dan Sunnah shahih mengisahkan suatu hukum yang pernah dilakukan umat terdahulu, melalui para rasul dan hukum tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an atau Sunnah, maka hukum tersebut berlaku pula untuk umat sekarang.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Imam Malik dalam berfatwa pertama, al-Qur'an, Sunnah (terutama sunnah orang-orang Madinah yang setingkat dengan sunnah *muwatirah*), *Ijma'*, dan *Qiyas*.<sup>63</sup>

Dari berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa Imam Malik adalah seorang yang berpikiran tradisional. Hanya karena kedalaman ilmunya, ia dapat mengimbangi berbagai perkembangan yang terjadi saat itu, namun dapat digaris bawahi Imam Malik dalam bermanhaj:

- a. Imam Malik mendahulukan amalan orang-orang Madinah sebelum *qiyas*, suatu metode yang tidak digunakan fuqaha lainnya. Karena menurut Imam Malik amalan orang-orang Madinah termasuk dalam kategori *sunnah mutawatirah* karena pewarisannya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara serempak, sehingga menutup

<sup>63</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal Lidirasat al-Fqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), cet. ke 1, h. 172

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan terjadi penyimpangan dari as-Sunnah. Hal ini terbukti karena orang-orang Madinah bergaul langsung dengan Rasulullah saw dan mengembangkan tradisi hidup Rasulullah saw.

- b. *Qaul* shahabat sebagai dalil syar'i yang didahulukan daripada *qiyas*, pendapat ini ditanggapi keras oleh Imam Syafi'i dengan alasan bahwa dalil hanya dapat diperoleh dari orang-orang *ma'sum*.
- c. Imam Malik menggunakan *mashlahah mursalah*, hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik menggunakan rasio ketika tidak ada penjelasan al-Qur'an dan Hadits tentang kasus tertentu.<sup>64</sup>

#### 5. Apresiasi Ulama kepada Imam Malik

Muhammad bin Abdul Hakim berkata, "Apabila Imam Malik mengeluarkan pendapatnya dan orang-orang lain tidak. Maka pendapatnya menjadi hujjah". Ibnu Mahdi berkata, "Tidak ada di atas dunia ini orang yang lebih selamat tentang hadits-hadits Rasulullah selain dari Imam Malik". Abu Ayyub bin Suwaid berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih benar ucapannya selain dari Imam Malik". Abu Hatim ar-Razi berkata, "Imam Malik seorang yang dipercayai dan imam untuk Hijaz dan beliau adalah setegas-tegas sahabat-sahabat az-Zuhri". Apabila mereka berselisih, fatwanya terserah kepada Imam Malik dan Malik seorang yang sangat bertakwa, percakapannya sangat bersih dan beliau lebih halus percakapannya dari ath-Thauri dan al-Auzai"<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Rachmat Al-Syafi'i, *Ijtihad Imam Malik*, (Bandung: Gunung Jati Press, 2000), cet. ke 1, h. 3.

<sup>65</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Amzah, 2003), cet. ke. 7, h. 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG SYIQAQ DAN HAKAM

### A. Tinjauan Umum Tentang Syiqaq

#### 1. Pengertian Syiqaq

Dalam sebuah ikatan pernikahan tidak dapat dipungkiri adanya perselisihan, apabila perselisihan tersebut datang dan berlanjut terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut tidak merasa sakinah, mawaddah dan rahmah diantara mereka. Hal ini merupakan perkara *syiqaq* yang harus segera diselesaikan. *Syiqaq* adalah puncak perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat menimbulkan entitas kemudharatan apabila perkawinan mereka masih diteruskan.

Kata *syiqaq* ( شقاق - يشاق - شقاقا ) dalam bahasa Arab mempunyai arti sisi, perselisihan, perpecahan, pertentangan atau persengketaan. Adapun yang dimaksud secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja الإِتِّحَاد yang berarti perselisihan ( النَّزَاع ) kebalikan dari kata الشَّقَّاق<sup>66</sup>.

Secara terminologi menurut Dr. Wahbah Zuhailly menjelaskan, yaitu:

الشَّقَاقُ هُوَ النَّزَاعُ الشَّدِيدُ بِسَبَبِ الطَّعْنِ فِي الْكِرَامَةِ

“*Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan.”

<sup>66</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Krayak, 1984), cet. ke 1, h. 785

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia menjelaskan *siqaq* sebagai alasan perceraian karena adanya bahaya (*dharar*). Bentuk *dharar* yang dilakukan suami kepada istrinya bisa berbentuk perkataan dan perbuatan, seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menyuruh paksa atas perbuatan yang diharamkan Allah, suami berpaling, berpisah ranjang tanpa ada sebab yang membolehkan.<sup>67</sup>

Dalam kamus istilah fiqih menjelaskan bahwa *syiqaq* adalah perpecahan atau perselisihan antara suami dan istri, yang penyelesaiannya diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak atau dengan menjuk hakim (orang yang akan mendamaikan kedua belah pihak).<sup>68</sup> Menurut Abd.Rahman Gazaly pengertian *syiqaq* yaitu krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadikan kedua pihak tersebut tidak mungkin dipertemukan dan keduanya tidak dapat mengatasinya.<sup>69</sup> *Syiqaq* merupakan perselisihan yang dimulai dan terjadi pada kedua belah pihak suami istri secara bersama-sama.<sup>70</sup>

Ahmad Rofiq menjelaskan defenisi *syiqaq* adalah percekcoan atau perselisihan yang terjadi antara suami istri, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35. Dalam hal ini diperlukan adanya penunjukan hakim dari kedua belah pihak yang diharapkan dapat

<sup>67</sup> Wahbah zuhaili, *al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam*, (Depok:Gema Insani, 2011), cet. ke 1, h. 456

<sup>68</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah, Syafi'ah A.M., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. ke. 1, h. 347

<sup>69</sup> Abd. Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. ke. 1, h. 127

<sup>70</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1997), cet. ke 1, h. 1708

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak suami dan istri.<sup>71</sup>

Sedangkan *syiqaq* menurut hukum positif adalah perselisihan, percekcoan, *syiqaq* diatur dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, yaitu bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Pengertian *syiqaq* juga tercantum dalam peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab XVI, dan di dalam KHI pasal 116 huruf f, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

Sedangkan dalam sejarah peradaban manusia, konflik pertama kali muncul adalah konflik keluarga dan berhubungan asmara. Anak Nabi Adam as Qabil telah membunuh saudara kandungnya (Habil) atas perjodohan dirinya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hingga sekarang, konflik keluarga (perceraian) menjadi konflik yang mendominasi perkara-perkara yang didaftar di Pengadilan Agama.

Dari beberapa definisi yang telah ada, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa setidaknya pengertian *syiqaq* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perselisihan atau percekcoan yang terjadi antara suami istri
- b. Perselisihan bersifat tajam dan terus menerus
- c. Adanya hakam yang bertugas sebagai juru damai

<sup>71</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), cet. ke 1, h. 216



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian tentang *syiqaq* harus memenuhi ketiga unsur tersebut, apabila salah satu unsur tersebut tidak ada maka bukan dinamakan *syiqaq*.

Sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri. Kemudharatan adalah aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan ataupun perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya.<sup>72</sup>

Dari beberapa pengertian *syiqaq* diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkara *syiqaq* adalah kondisi tidak stabilnya ikatan pernikahan disebabkan adanya pertengkaran atau percekocokan diantara suami istri yang terus menerus dan membutuhkan penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

#### 2. *Syiqaq* dalam al-Qur'an dan Undang-Undang

Mengkaji perkara *syiqaq* sebagai institusi hukum Islam yang *khas* tidak bisa melepaskan diri dari kajian terhadap ketentuan dasar, sebenarnya permasalahan *syiqaq* sudah tidak asing lagi bagi kita, karena salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah *syiqaq*.

<sup>72</sup> Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam*, (Depok:Gema Insani, 2011), cet. ke 1, h. 456

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun jauh sebelumnya al-Qur'an dan al-Hadits telah menjelaskannya, yaitu:

a. Al-Qur'an

Dalam surat an-Nisa' ayat 35 Allah ta'ala menjelaskan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>73</sup>

Dalam ayat sebelumnya Allah ta'ala telah menyebutkan kondisi yang pertama, yaitu apabila pembangkangan dan *nusyuz* (kekurangajaran) berasal dari seorang istri. Kemudian dalam ayat 35 ini Allah menyebutkan kondisi yang kedua, yaitu apabila pembangkangan berasal dari pasangan suami istri, para ulama fiqh berkata, “Jika terjadi persengketaan di antara pasangan suami istri, maka hakim lah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara mereka berdua dan mencegah orang yang hendak melakukan kezaliman di antara keduanya.

<sup>73</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabil Raudlatul Jannah, 2010), cet. ke 1, h. 406

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi jika perkara tersebut semakin parah dan persengketaannya semakin panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si istri dan seorang yang dipercaya dari pihak suami untuk berkumpul dan mempertimbangkan perkara kedua pasangan tersebut.

Kemudian utusan keluarga tersebut melakukan upaya untuk kemaslahatan mereka berdua, antara memisahkan pasangan suami istri itu atau tetap mempersatukannya sebagai pasangan suami istri kembali. Akan tetapi syari'at lebih menganjurkan untuk tetap menyatukan keduanya, oleh karena itu Allah berfirman: Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.<sup>74</sup>

Dari keterangan surat An-Nisa' ayat 35 sangat berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, ini berarti *syiqaq* yang terjadi adalah percekcoan antara suami dan istri, bukan percekcoan lainnya.

#### b. Undang-undang

Selain dasar hukum dari ayat al-Qur'an dan Hadits, *syiqaq* juga diatur dalam hukum positif Indonesia yang diakui dalam peraturan perundang-undangan untuk alasan perceraian antara suami istri, yaitu:

Pertama, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Alasan

<sup>74</sup> Ahmad Syakir, *Umdah at-Tafsir 'An al-Hafizh Ibn Katsir*, Terj. Suharlan, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), cet. ke 1, h. 129-130



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjadi pertimbangan majelis hakim apakah layak putusan cerai dijatuhkan atau tidak.

Kedua, Pasal 76 UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menyatakan bahwa “Bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat *hakamain* untuk mendamaikan suami istri tersebut”.

Ketiga, dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam (KHI), “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”<sup>75</sup>

Dalam perundang-undangan Indonesia, menurut penulis sangat memperhatikan keberlangsungan kehidupan berumah tangga, karena pernikahan adalah perjanjian yang telah disepakati untuk dilaksanakan pasangan suami istri. Tentunya perundang-undangan Indonesia ikut membantu memberi solusi apabila terjadi hal seperti *syiqaq* dan sejalan dengan al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 35.

### 3. Macam-macam *Syiqaq*

*Syiqaq* yang terjadi di antara suami istri terkadang disebabkan oleh beberapa macam perkara:<sup>76</sup>

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (tt: Pustaka Kasim, 1997), cet. ke 1, h. 265

<sup>76</sup> Ahamad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrin Abu Bakar dan Hery Nofri Aly, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1986), cet. ke 1, h. 42

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Syiqaq* terjadi disebabkan oleh *nusyuznya* istri, hal yang perlu dilakukan adalah hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan dalam surah An-Nisa' ayat 34 (memberi nasehat bagi istri semaksimal mungkin, jika dinasehati tidak ada perubahan maka suami memisahkan tempat tidurnya, jika sikap istri belum berubah maka Allah ta'ala mengijinkan untuk memukul mereka sekedar memberi peringatan yang sifatnya tidak melukai).
- b. *Syiqaq* terjadi karena kezaliman suami terhadap istri, hal ini dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan *nusyuznya*. Maka selanjutnya dikhawatirkan terjadi perpecahan, maka kedua suami istri beserta keluarga wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Dalam ayat tersebut bahwa dua orang hakam mengetahui masalah privasi pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka sehingga dapat ikut membantu menyelesaikan masalah.

Menurut penulis, *syiqaq* terjadi dari salah satu pihak dan berlanjut saling cekcok karena situasi dimana baik suami ataupun istri, keduanya secara aktif saling berselisih, sama-sama melakukan tindakan yang membentuk perselisihan yang tajam antara keduanya.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau B. Tinjauan Umum Tentang Hakam

### 1. Pengertian Hakam

Istilah hakam berasal dari bahasa Arab *al-Hakamu* yang berarti wasit atau juru penengah.<sup>77</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia hakam berarti perantara, pemisah, wasit.<sup>78</sup>

Hakam menurut istilah adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para Mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua orang hakam, apabila terjadi persengketaan antar suami istri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.<sup>79</sup>

Tentang hakam adalah lanjutan dari surah an-Nisa' ayat 35, Noel J Coulson memberi sinonim “arbitrator” sebagai kata yang sepadan dengan hakam. Begitu juga Mirza Mutahhari mengemukakan padanan kata hakam dengan “arbiter”. Menurut Mirza hakam dipilih dari keluarga suami dan istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami istri dapat terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Pengertian ini sangat

<sup>77</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Krayak, 1984), cet. ke 1, h. 309

<sup>78</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Semarang: Toha Putra, 2008), cet. ke 1, h. 383

<sup>79</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. ke 1, h. 554



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dekat dengan maksud yang tertulis dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 35.<sup>80</sup>

Ibnu Quddamah menjelaskan, bahwa apabila terjadi konflik antar suami dan istri dan dikhawatirkan akan memanas hingga terjadi pembangkangan, maka hakim bisa mengirim hakam dari pihak keluarga suami dan hakam dari pihak istri untuk meminta keridhaan suami dan istri dan sebagai wakil untuk menyarankan apakah keduanya akan tetap bersatu atau akan berpisah. Kemudian hasil negosiasi dari kedua mediator dianggap berlaku.<sup>81</sup> Menurut Hamka pengertian hakam adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.<sup>82</sup> Amir syarifuddin menyebutkan bahwa hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.<sup>83</sup>

Hakam dalam *literature* Islam disamakan dengan konsep mediasi (mediator) yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 35, dalam sebuah kaidah Ulumul Qur'an yang masyhur, suatu pengertian diambil karena keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab jika kaidah ini diterapkan pada ayat tersebut diatas maka kita akan sampai pada

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (tt: Pustaka Kani, 1997), cet. ke 1, h. 270

<sup>81</sup> Ibnu Quddamah, *al-Mughni*, Terj. Dudi Rosadi dan Solihin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. ke 1, h. 114

<sup>82</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), cet. ke 1, h. 68

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Predana Media, 2006), cet. ke 1, h. 195

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan bahwa hakam tidak hanya dapat difungsikan pada proses perkara perceraian saja, seperti yang ditujukan secara eksplisit pada ayat al-Qur'an melainkan dapat bersifat secara luas pada semua bentuk sengketa. Metode pengambilan hukum ini didukung dengan mempertahankan metode lain berupa isyarat nas-nas yang terdapat pada ayat tersebut dimana Allah lebih menghendaki penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai oleh mereka sendiri.<sup>84</sup>

Secara umum, pengangkatan atau penunjukan hakam atau yang disebut tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini dengan pengangkatan seseorang atau lebih sehingga wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan permasalahan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "hakam". Tahkim sendiri berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa.

Dalam ayat tentang hakam dinyatakan bahwa hakam dari pihak keluarga kedua belah pihak (suami-istri), pernyataan bahwa hakam dari pihak keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa hakam itu disyaratkan berasal dari kalangan keluarga suami dan istri. Meski pada prinsipnya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadikan hakam dalam penyelesaian sengketa *syiqaq*, tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah

<sup>84</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Riset Press, 1996), cet. ke 1, h. 246

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak.

Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi hakam adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga seorang hakam dari kedua belah pihak lebih diutamakan.

Filosofi pengangkatan hakam dari kedua belah pihak adalah mereka dianggap lebih tau keadaan suami istri secara baik, keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percekocokan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami istri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.<sup>85</sup>

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa akan lebih bijak apabila hakam berasal dari pihak keluarga masing-masing suami istri, namun keterlibatan pihak luar biasa saja terjadi:

فان لم يكون من اهلها بعث القاضي رجلين اجنبيين ويستحسن ان يكون من جران الزوجين ممن لهما خبرة بحال الزوجين وقدرة الاصلاح بينهما

“Jika keduanya tidak berasal dari keluarga kedua suami istri, Hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan keluarga, baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami istri yang mengetahui betul keadaan suami istri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya”.<sup>86</sup>

Apa yang dijelaskan di atas hampir sama dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan pasal 76 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989:

<sup>85</sup> Muhammadah Syaifullah, *Historis Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Semarang: Prenada Media, 2002), cet. ke 1, h. 82

<sup>86</sup> Wahbah zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam*, (Depok:Gema Insani, 2011), cet. ke 1, h. 727



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap perkata *syiqaq*”.

Dari definisi yang disimpulkan di atas bahwa hakam adalah dua orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam rumah tangga melalui perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan maslahat.

#### 2. Dasar Hukum Hakam

Hakam sendiri bisa diangkat dari lembaga pradilan atau mengangkat dari keluarga, dalam hal ini dijelaskan oleh:

##### a. Al-Qur'an

Surah an-Nisa' ayat 35;

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dimana perkara *syiqaq* oleh Allah Ta'ala langsung memberi solusi dengan memberi petunjuk untuk menyelesaikannya dengan mengangkat dua orang hakam jika sudah mengkhawatirkan keduanya.

Dalam kitab Tafsir Jalalain karya Imam Jalalain menafsirkan pada ayat tersebut Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadinya *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau pilihan suami istri, atau oleh keluarga suami istri. Dua orang hakam itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas hakam itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikannya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Apabila kedua hakam tersebut dalam mencari *islah* pada tahap pertama tidak berhasil, maka diusahakan lagi penunjukan dua hakam yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketaan dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun itu belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakam yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat”.<sup>87</sup>

*Syiqaq* yang timbul dari suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya, maka secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu sebagai berikut:

<sup>87</sup> Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin aS-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Nanyudi Syaf dan Behrem Abubakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), cet. ke 1, h. 343-345

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena *nusyuz*-nya istri, ditempuh dengan jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus *nusyuz*. Bila ternyata sebab konflik berasal dari *nusyuz*-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk mmenasehatinya agar tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seseorang yang berwibawa untuk menasehati keduanya.

*Kedua*, bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menentukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.<sup>88</sup>

Selanjutnya surah an-Nisa' ayat 114;

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ  
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ  
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. ke 1, h. 195-196



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.<sup>89</sup>

Maksud dari ayat di atas menurut Syekh Abdul hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya dia (hakam, mediator) pada saudaranya yang satu (suami) menyampaikan dengan kabar gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai). Demikian juga dia (hakam, mediator) menceritakan kepada yang satu lagi (istri) juga menyampaikan dengan kabar kebaikan. Supaya hati mereka berdua (suami istri) dapat menyatu.<sup>90</sup>

#### b. Hadits

Hadits yang menjelaskan tentang *syiqaq* adalah sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ الْحَكَمِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) إِنَّ إِلَهُمَا الْفَرْقَ وَالْإِجْتِمَاعُ, قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْحَكَمِينَ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفَرْقَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ<sup>91</sup>

Artinya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang difirmankan Allah ta’ala: (Dan jika kamu

<sup>89</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), cet. ke 1, h. 97

<sup>90</sup> Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah keluargaku ke Syurga: Panduan Membimbing Keluarga agar berjalan di atas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007), cet. ke 1, h. 41-42

<sup>91</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwattha’*, Juz 2 (Lebanon: Darul Ihya wa at-Turratsul Araby, 1985), cet. ke 1, h. 584

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal), Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. Malik berkata: “itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan”.<sup>92</sup>

#### c. Undang-undang

Tentang dasar hukum penetapan atau pengangkatan hakam ini dapat diketahui dari pasal 76 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, yaitu:

*Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.*

Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2008 juga disebutkan tentang pengangkatan hakam.

### 3. Syarat Pengangkatan Hakam

Dalam perspektif fiqih, hukum mengangkat hakam ini para ulama berbeda pendapat dalam memahami bentuk amar dari ayat فابعثوا حكما , sehingga ada yang mengatakan hukum mengangkat hakam adalah wajib sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i dengan alasan

<sup>92</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwattha'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, *al- Muwattha' Imam Malik ibn Anas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999), cet. ke 1, h. 318

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan penganiayaan itu termasuk kewajiban umum bagi penguasaan terutama Pengadilan.<sup>93</sup>

Yang perlu diperhatikan sebelum mengangkat hakam adalah siapa yang berhak mengangkat hakam tersebut, para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai siapa yang mengangkat hakam.<sup>94</sup>

*Pendapat pertama*, menyatakan bahwa yang berhak mengangkat hakam adalah suami istri yang berselisih, pendapat ini dikemukakan oleh Abbas dan Imam Syafi'i juga condong kepada pendapat ini.

*Pendapat kedua*, yang berhak mengangkat hakam ialah pihak-pihak suami dan pihak-pihak istri, karena ayat 35 dari surah an-Nisa' ditujukan kepada mereka. Secara umum di bidang muamalah hakam ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta.

Said bin Jubair berpendapat bahwa yang mengangkat hakam adalah penguasa, sedangkan jumhur ulama termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan hakam adalah para hakim atau pemerintah, karena ayat diatas di tujukan kepada seluruh kaum muslimin.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa' iul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min al-Qur'an*, Juz I, (Makkah: Maktabah Al-Ghazaly, 1980), h. 471-472

<sup>94</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 308

<sup>95</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke. 3, h. 190



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang kriteria macam-macam hakam ini, dikelompokkan dalam dua klasifikasi yaitu tentang siapa yang menjadi hakam dan siapa yang berhak mengangkat hakam.

Pertama, tentang siapa yang menjadi hakam, ada 2 macam yaitu hakam yang berasal dari masing-masing keluarga suami istri dan hakam dari pihak lain. Adanya dua macam hakam, dalam hal ini tidak lepas dari perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama. Pendapat pertama tentang hakam dari pihak keluarga, ini memang tertera secara jelas di dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 35. Di antara para ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Umar az-Zamakhsari, dia berpendapat bahwa juru damai harus terdiri dari keluarga masing-masing pihak suami istri. Dengan alasan, pertama bahwa keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. Kedua bahwa keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebaahagian kedua suami istri tersebut. Ketiga bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih. Keempat bahwa kepada mereka berdua suami istri akan leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.<sup>96</sup>

Tentang hukumnya, menurut as-Shabuni bahwa pengangkatan hakam dari pihak keluarga ini hukumnya wajib. Dia beralasan menurut zahir ayatnya di dalam al-Qur'an bahwa hakam itu dipersyaratkan dari

<sup>96</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1997), cet. ke 1, h. 1709

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, karena disitu dikatakan dengan “seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri”.<sup>97</sup>

Sedangkan pendapat kedua yang mengatakan hakam boleh dari pihak luar keluarga suami istri diantaranya yaitu Syihabuddin Mahmud al-Alusi. Ia berpendapat bahwa hakam boleh saja diambil dari luar keluarga kedua belah pihak. Dalam pandangannya, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus *syiqaq*, sebab tujuan pokok dari pengutusan hakam adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, keluarga dekat atas dasar dugaan yang kuat lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga menurut al-Alusi, mengutus juru damai dari keluarga kedua belah pihak yang sedang berselisih tetap lebih dianjurkan dan lebih diutamakan.<sup>98</sup> Dalam hal ini M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pengangkatan hakam dari pihak keluarga bukan sebuah kewajiban, hal ini bisa dipahami dari pendapatnya yang mengatakan bahwa selama tujuan penunjukan hakam bertindak untuk mendamaikan, sama sekali tidak bertentangan dengan makna dan jiwa ayat 35 surah an-Nisa’ tanpa mempersoalkan siapa yang ditunjuk atau ditetapkan menjadi hakam.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa’iul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min al-Qur’an*, Juz I, (Makkah: Maktabah al-Ghazaly, 1980), cet. ke 1, h. 412

<sup>98</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1997), cet. ke 1, h. 1709

<sup>99</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (tt: Pustaka Karini, 1997), cet. ke 1, h. 249

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, tentang siapa yang berhak mengangkat hakim, juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih, yaitu hakim yang diangkat oleh masing-masing pihak suami istri dan hakim yang diangkat oleh hakim atau pemerintah atau lebih dikenal dengan istilah haakam min jihhadil hakim. Pendapat yang mengatakan hakim diangkat oleh masing-masing suami istri diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya dan sebagian pengikut Imam Hambali, mereka beralasan bahwa ayat 35 surah an-Nisa' ditujukan kepada pihak-pihak suami dan pihak-pihak istri.<sup>100</sup> Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hakim diangkat oleh hakim atau pemerintah adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, ssebagian yang lain dari pengikut Imam Hambali, asy-Sya'bi dan Ibnu 'Abbas, dengan alasan bahwa lafadz *fab'atsu* pada ayat 35 surah an-Nisa' ditujukan kepada seluruh kaum muslimin.<sup>101</sup>

Kemudian tentang persyaratan untuk dapat dijadikan hakim, terdapat beberapa pendapat diantaranya yaitu menurut Ibnu Rusyd. Ia mengatakan bahwa seorang hakim disyaratkan harus orang-orang yang berakal. Baligh, adil, dan muslim. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hakim harus laki-laki, adil, dan mengetahui cukup informasi mengenai permasalahan keluarga yang ingin didamaikan.<sup>102</sup> Sayyid Sabiq dalam

<sup>100</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke. 3, h. 190

<sup>101</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1997), cet. ke 1, h. 1709

<sup>102</sup> *Ibid*, h.1709



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqih sunnahnya juga menyebutkan tentang persyaratan hakam, yaitu orang yang berakal, baligh atau dewasa, adil, dan muslim.<sup>103</sup>

Dalam fiqih munakahat karangan Slamet Abidin dan Aminuddin disebutkan tentang persyaratan menjadi hakam, yaitu:

- a. Berlaku adil antara pihak yang bersengketa
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas
- c. Disegani oleh kedua pihak suami istri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>104</sup>

Sedangkan syarat menjadi hakam yang telah disepakati oleh para ulama fiqih, adalah:

- a. Islam, kedua hakam tersebut harus beragama islam, tidak boleh hakam tersebut selain islam, karena Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman
- b. Berakal, tidak sah apabila hakam tersebut memutuskan dalam keadaan gila/hilang akal
- c. Baligh, telah mencapai usia dewasa, karena hakam membutuhkan penalaran untuk memutuskan perkara tersebut dipisah atau disatukan
- d. Adil, yaitu dapat menjaga agama dan melaksanakan amanat.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), cet. ke 1, h. 408

<sup>104</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka, 1999), cet. ke 1, h. 193

<sup>105</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke 1, h. 319-320

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Kewenangan Hakam

Dari pengertian hakam di atas dapat ditarik sebuah gambaran bahwa tugas dan wewenang hakam sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan karena alasan *syiqaq* adalah sebagai berikut:

- a. Hakam sebagai sarana penyelesaian perselisihan informal diwakili oleh yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih. Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi hakam sesuai kesepakatan.
- b. Hakam bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya lancarnya proses hakam, maka hakam seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh data dan informasi tentang keinginan-keinginan para pihak yang berselisih dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan masing-masing pihak. Kelancaran dan ketertiban proses hakam sangat menentukan berhasilnya proses hakam dengan baik.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan”.<sup>106</sup>

<sup>106</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), cet. ke 1, h. 28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memang benar tak dapat dipungkiri berkaitan dengan kewenangan hakam ini masih beda pendapat di kalangan ulama mazhab, secara garis besar pendapat mereka terbagi kepada dua golongan tentang apakah jika dia gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraian tanpa seizin suami.

Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad bin Hambal bahwa seorang hakam juga berhak memutuskan perceraian atau mendamaikan tanpa harus ada kuasa terlebih dahulu dan izin dari suami istri sepanjang ada kebaikan (mashlahat), karena menurut mereka seorang hakam sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusannya harus dilaksanakan. Dalam konteks ini hakam sama dengan arbitrase.<sup>107</sup>

Kedua, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa hakam tidak dapat menceraikan suami istri, kecuali dengan kerelaan keduanya sebab hakam hanya sebagai delegasi (wakil), sebagaimana diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, Qatadah dan Zaid bin Aslam.<sup>108</sup> Seorang hakam hanya sebatas mediator dan tidak mengambil keputusan. Dalam konteks ini hakam sama dengan mediasi ditinjau dari kajian ilmu fiqh, tidak terdapat kesepakatan yang bulat mengenai pengangkatan hakam.

<sup>107</sup> Wahbah zuhaili, *al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam*, (Depok:Gema Insani, 2011), cet. ke 1, h. 727

<sup>108</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya, 1986), cet. ke 1, h. 138



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penelitian Mirza Mutahhari terdapat dua aliran dalam menentukan hukum pengangkatan hakim dalam perkara *syiqaq*. Sebagian berpendapat hukumnya “Sunnah” dan ada pula ulama yang menetapkan hukumnya “Wajib”, asalkan terjadi perkara perceraian yang didasarkan atas alasan *syiqaq* tata cara pemeriksaan perkaranya mesti melalui hakim.<sup>109</sup>

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakim tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi ‘Atha’ dan salah satu pendapat dari Imam Syafi’i, menurut satu hikayat dari Al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakim itu sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang hakim tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini adalah bahwa kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi istri, keduanya telah dewasa, cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali dengan seizin keduanya. Golongan selanjutnya yang terdiri dari Ali, Ibnu Abbas, asy-Sya’bi, Imam Malik, al-Auza’iy, Ishak, dan Ibnu Munzir menurut mereka dua orang hakim itu berkedudukan sebagai hakim, dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut

<sup>109</sup> Mirza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Bandung, 1982), cet. ke 1, h. 243

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kepada suami istri, baik untuk mendamaikannya, atau menceraikannya tanpa tebusan. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah petunjuk ayat yang disebutkan di atas.<sup>110</sup>

Dalam UU No.7 Tahun 1989 lebih condong kepada pendapat yang pertama yaitu mensejajarkan pengangkatan hakam sebagai tindakan “Sunnah” bukan “wajib”. Hal ini sesuai dengan pasal 76 ayat 2 dalam kalimat “Pengadilan dapat mengangkat hakam apabila proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan dipengadilan”. Dengan begitu pengangkatan hakam merupakan tindakan kasuistik, tergantung kepada pendapat dan penilaian Hakim atas ukuran mana yang lebih mendatangkan “ Mashlahat” dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika “Islah” dapat diperkirakan lebih mudah dicapai melalui hakam, pengangkatan hakam bisa berubah menjadi wajib dengan catatan hakim tidak boleh bersikap apriori. Dengan demikian pengangkatan hakam tidak selalu cenderung pada prinsip “Sunnah” atau “Wajib”. Kedua patokan hokum itu dapat dipakai hakim sesuai dengan kondisi dan hasil pemeriksaan. Cara bertindak yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 76 ayat 2 dan surah an-Nisa’ ayat 35.

Kemudian pada tahun 1938 setelah diadakan muktamar perhimpunan penghulu dan pegawainya dinyatakan persetujuannya bahwa hakam mempunyai kekuasaannya seperti hakim. Pendapat ini didukung Nahdhatul Ulama yang menerangkan tidak keberatan dilakukan hokum

<sup>110</sup> Ibnu Quddamah, *al- Mughni*, Terj. Dudi Rosadi dan Solihin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. ke 1, h. 115

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syiqaq*, dalam Mukhtamar Nahdhatul Ulama Ke-1 di Surabaya tanggal 21 Oktober 1926 memutuskan bahwa:

Hakim diperbolehkan memberi keputusan dengan menggunakan pendapat kedua, apabila untuk kemashlahatan suami istri tidak terdapat jalan lain kecuali dengan menggunakan *al-Qaul Tsani* tersebut, pendapat mukhtamar ini berdasarkan pada kitab al-Makhalli ‘Alal Minhaj.<sup>111</sup>

Jika dilihat dari segi pendekatan hukum Islam maupun dari segi pendekatan hukum acara perdata, pengusulan hakim sebaiknya datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas mengusulkannya siapa yang mereka inginkan untuk menjadi hakim dari pihaknya. Akan tetapi apa yang mereka usulkan tidak mengikat hakim. Oleh karena itu penunjukan hakim yang disampaikan para pihak tidak mutlak mengikat. Asalkan hakim sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam hukum Islam yakni jujur, cakap, berwibawa, disegani oleh suami istri dan memiliki kapasitas sebagai juru damai.

Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim, seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim dilingkungan pengadilan tersebut dapat

<sup>111</sup> PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.th), cet. ke 1, h. 8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan fungsi sebagai mediator.<sup>112</sup> Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator. Pada teksnis pelaksanaannya, hampir semua hakim di Pengadilan Agama bertindak sebagai mediator karena ketua pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5 mediator. Hal ini dimaksudkan agar semua hakim secara bergantian dapat berfungsi sebagai mediator untuk proses mediasi, disamping melaksanakan tugas utama sebagai hakim untuk proses litigasi. Tujuan lain pencantuman semua hakim ini adalah untuk memudahkan para pihak yang berperkara memilihnya sebagai mediator untuk penyelesaian perkaranya.<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Tim Redaksi Grahamedia Press, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Grahamedia Press, 2014), cet. ke. 1, h. 401

<sup>113</sup> Muhammad Syaifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, (Semarang : Prenada Media, 2002), cet. ke 1, h. 187-188

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* ini menurut Imam Syafi'i adalah hakim tidak boleh serta merta menjatuhkan talak pada istri sebelum mendapat persetujuan pihak suami, begitu pula hakim dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapatkan persetujuan istri. Sedangkan menurut Imam Malik adalah hakim tersebut mempunyai kewenangan penuh atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, ia boleh memberikan putusan sesuai kondisi hubungan suami istri yang sedang berselisih tersebut, apakah hakim itu akan memberi keputusan cerai atau memerintahkan agar keduanya berdamai kembali.
2. Bahwa kedudukan hakim di Pengadilan Agama di Indonesia adalah sebagai media untuk menelusuri permasalahan yang terjadi antara suami istri, serta memahami dan menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak kedua belah pihak tanpa memberi putusan. Kemudian temuan hakim dilaporkan kepada hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam memberi putusan, ketentuan pasal 76 No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menyatakan bahwa "Bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat hakam untuk mendamaikan suami istri tersebut.

3. Pendapat kedua Imam tersebut sangat relevan dengan perintah pengangkatan hakam, namun realita yang terjadi dilapangan, tak selamanya hakam yang ditunjuk berjumlah dua orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing pihak.

#### B. Saran dan Amanat

Berdasarkan uraian di atas, maka saran sekaligus amanat yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilakukan oleh suami istri, hendaklah dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, karena nikah diniatkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Dalam pemilihan calon suami, hendaklah dimusyawarahkan secara baik antara mempelai wanita dan keluarganya, sehingga didapat persetujuan dari keduanya.
3. Untuk menghadapi konflik yang terjadi dalam rumah tangga, keduanya harus bisa saling memahami bentuk kesalahan dan cepatlah meminta maaf apabila melakukan kesalahan.
4. Konflik yang terjadi terus menerus harus ada campur tangan dari masing-masing keluarga, agar konflik tersebut tidak semakin tajam. Jika memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali, maka ambillah jalan terbaik demi kemaslahatan suami istri tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1997) cet. ke. 1
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Semarang: Literasi Nusantara, 2019), cet. ke. 1
- Fatmawati, Endang. *Matabaru Peneliian Perpustakaan*, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2013), cet. ke. 1
- Zet, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) cet. ke. 1
- Majib, Abdul, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, (Bandung: Kencana, 2007) cet. ke. 1
- Abdul Mujieb. M. Mabururi Tholhah, Syafi'ah A.M. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. ke. 1
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka, 1999) cet. ke. 1
- Zahra, Abu. *al-Syafi'i Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara'uhu Wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) cet. ke. 1
- Zahra, Abu. Muhammad. *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) cet. ke. 1
- Al Farran, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, Terj. Fedrian Hasmand dkk, "*Tafsir Imam Syafi'i; Menyelami Kedalaman Kandungan al-Qur'an*", Jilid 2: Surah An-Nisa'-Surah Ibrahim, (Jakarta: Almahira, 2008) cet. ke. 1
- Al Hajwy, Muhammad Ibn Hasan. *al-Fikr al-Sunnah Fi Tarikh al-Fikr al-Islamy*, Jilid I, (Madinah; Maktabah al-Ilmiyah, 1996) cet. ke. 1
- Al Jaziri, Abd. Ar-Rahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib Al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1996) cet. ke. 1
- Al Mahally, Jalaluddin dan Imam Jalaluddin aS-Suyuti. *Tafsir Jalalain*, Terj. Nahyudi Syaf dan Behrem Abubakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru, 1990) cet. ke. 1
- Al Mawardi al-Bashry, Abu al-Hasan Ali. *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam al-Syafi'i*, Juz 9, (Baerut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tth) cet. ke. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Qaththan, Manna. *Tarikh at-Tasyri' al-Islam, at-Tasyri' wa al-Fiqh*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2001) cet. ke. 1
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) cet. ke. 1
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) cet. ke. 1
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011) cet. ke. 1
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'iul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min al-Qur'an*, Juz I, (Makkah: Maktabah al-Ghazaly, 1980) cet. ke. 1
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Wafa', 2001) cet. ke. 1
- Az-Zarqani, Yusuf. *Syarh az-Zarqaniy 'Ala al-Muwatta' al-Imam Malik*, Juz 3, (Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990) cet. ke. 1
- Bultaji, Muhammad. *Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi Qarni Ats-Tsani al-Hijri*, (Madinah: Maktabah Imiah, 1997) cet. ke. 1
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) cet. ke. 1
- Citra Umbara. *Undang-undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007) cet. ke. 1
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga
- Djazuli. *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), cet. ke. 9
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005) cet. ke. 1
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (tt: Pustaka Kartini, 1997) cet. ke. 1
- Al-Jamal, Hasan. *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003) cet. ke. 1
- Hayari, Nadirsyah. *sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009) cet. ke. 1
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, tth) cet. ke. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*, Terj. Dudi Rosadi dan Solihin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) cet. ke. 1
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2, (Lebanon: Darul Ibnu Hazm, 1995) cet. ke. 1
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman, (Semarang: As-Syifa', 1990) cet. ke. 1
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989) cet. ke. 1
- Bin Anas, Imam Malik. *al-Muwattha'*, Juz 2 (Lebanon: Darul Ihya wa at-Turratsul Araby, 1985) cet. ke. 1
- Suprayogo, Imam dan Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011) cet. ke. 1
- Imron Rosadi dkk. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) cet. ke. 1
- Jawad, Mughniyyah. *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 1996) cet. ke. 1
- Kementrian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010) cet. ke. 1
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996) cet. ke. 1
- Mashum Zein, Muhammad. *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2013) cet. ke. 1
- Machlis M Hanafi dkk. *Biografi Lima Imam Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013) cet. ke. 1
- Mhammad Ghanam, Abdul Hamid. *Bawalah keluargaku ke Syurga: Panduan Membimbing Keluarga agar berjalan di atas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007) cet. ke. 1
- Makhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke. 3
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Krapiak, 1984) cet. ke. 1
- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra, 1986) cet. ke. 1





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Maahhari, Mirza. *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Bandung, 1985) cet. ke. 1
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Al-Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) cet. ke. 1
- Nata, Abuddin. *Masail al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke. 4
- Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqh Suatu pengantar Komprehensif Kepada Hukum islam*, (Bandung: Tafakur, 2007), cet. ke. 1
- PBNU. *Ahkamul Fuqaha*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.th) cet. ke. 1
- Shihab, Quraish M. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet. ke. 5
- Al-Syafi'I, Rachmat. *Ijtihad Imam Malik*, (Bandung: Gunung Jati Press, 2000) cet. ke. 1
- Gazali, Abd.Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. ke. 1
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013) cet. ke. 1
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) cet. ke. 1
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Saidan, Kasuwi. *Metode Ijtihad Ibn Rusdy*, (Malang: Kutub Minar, 2005) cet. ke. 1
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) cet. ke. 1
- Sofyan A.P.Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), cet. ke. 1
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) cet. ke. 1
- Syaifullah, Muhammad. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, (Semarang: Prenada Media, 2002) cet. ke. 1
- Syaifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) cet. ke. 1
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syakir, Ahmad. *Umdah At-Tafsir 'An Al-Hafizh Ibn Katsir*, Terj. Suharlan, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014) cet. ke. 1
- Syaodah, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009) cet. ke. 1
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Predana Media, 2006) cet. ke. 1
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) cet. ke. 1
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997) cet. ke. 1
- Tim Ilmiah Purnasiswa. *Sejarah Tasyri' Islam*, (Lirboyo: Forum Pengembangan Intelektual, 2006) cet. ke. 1
- Tim Redaksi Grahamedia Press. *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Grahamedia Press, 2014), cet. ke. 1
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), cet. ke. 8
- Umdah El-Baroroh dan Tutik Nur Jannah. *Fiqih Sosial Masa Depan Fiqih Indonesia*, (Pati: Pusat Fisi, 2016) cet. ke. 1
- Yusuf, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya, 1986) cet. ke. 1
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), cet. ke. 2
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, "*Fiqih Islam*", (Depok: Gema Insani, 2011) cet. ke. 1



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **KEWENANGAN HAKAM TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKARA SYIQAQ (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM SYAFI' DAN IMAM MALIK)** yang ditulis oleh :

Nama : **Pahrizal Nasution**  
NIM : 11523104780  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2019  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Sekretaris  
**Aprizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Helmi Basri, Lc, MA**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus. S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **KEWENANGAN HAKAM TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKARA SYIQAQ (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK)** yang ditulis oleh :

Nama : **Pahrizal Nasution**  
 NIM : 11523104780  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2019  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Sekretaris  
**Aprizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Helmi Basri, Lc, MA**



Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PAHRIZAL NASUTION  
 NIM : 1153104780  
 Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
 Judul : KEWENANGAN HAKAM TENTANG PERCERAIAN  
 DALAM PERKARA SYIQAQ (STUDI KOMPARATIF  
 PENDAPAT IMAM SYAFT'I DAN IMAM MALIK  
 Pembimbing : DR. H. JOHARI, M.Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 Juli 2020

A. Pimpinan Redaksi,

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT PENULIS



**PAHRIZAL NASUTION**, dilahirkan di Desa Tanggabosi kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 06 April 1996. Anak keenam dari sembilan bersaudara yang merupakan putra dari pasangan Mhd. Dahler Nst dan Samsidar Nst. Penulis Menempuh Pendidikan mulai dari SD Negeri 142558 Kecamatan Siabu tamat pada tahun 2009. Melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Tanggabosi kecamatan Siabu Tingkat Wustho (MTs) tamat pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Pondok Pesantren Darul Hadits Hutabaringin kecamatan Siabu tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA RIAU dengan judul skripsi **“Kewenangan Hakam Tentang Perceraian Dalam Perkara *Syiqaq* (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)”**. Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 11 Desember 2019 dan menyandang Gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN SUSKA RIAU.

UIN SUSKA RIAU